



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO.01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT KUANTAN TENGAH

RANTI SRI WULANDARI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km
7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
email: ranti.wulan111@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the presentation of government financial statements prepared by the Camat Kuantan Tengah Office period 2018 and 2019 as a whole is in accordance with PSAP No.01 About the Presentation of Financial Statements. This study uses a comparative descriptive research design with the aim of providing a detailed description of the background and characteristics typical of the subject under study. This study uses primary and secondary data in the form of 2018 and 2019 financial statements consisting of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Equity Change Report and Notes to Financial Statements. The results of this study indicate that the Camat Kuantan Tengah Office has conducted a process of preparing financial statements in accordance with PSAP No.01 Regarding the Presentation of Financial Statements regulated in PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. For the recording process, the financial statements are appropriate, although there are still some shortcomings in including the elements in the Budget Realization Report, but the financial statements have been made and presented on time so that they can be used by a group of users of financial statements to make decisions.

Keywords: PSAP No.01, Government Financial Reports at the Camat Kuantan Tengah Office, Budget Realization Reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif komparatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang dan karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan periode 2018 dan 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor

Camat Kuantan Tengah telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk proses pencatatan laporan keuangan sudah sesuai, walaupun masih ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada Laporan Realisasi Anggaran, namun laporan keuangan telah dibuat dan disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh sekelompok pengguna laporan keuangan guna mengambil keputusan.

Kata Kunci : PSAP No.01, Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Kuantan Tengah, Laporan Realisasi Anggaran.

1. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. *Opini disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Penerapan PSAP No 01 tentang penyajian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.

Terkait dengan penelitian PSAP No 01 Kantor Camat Kuantan Tengah harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, pelatihan sumber daya manusia dan penyedia sarana dan prasarana untuk menunjang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Masalah yang terdapat pada Kantor Camat Kuantan Tengah adalah mengenai Laporan Realisasi Anggaran, karena masih banyak akun-akun yang tidak di masukkan kedalam laporan realisasi anggaran, seperti akun transfer, akun pembiayaan dan akun sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, telah menjelaskan tentang unsur-unsur laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, Surplus/Defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Masalah selanjutnya pada Kantor Camat Kuantan Tengah adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan dari bidang Akuntansi. Menurut peneliti hal ini sangat mempersulit terkait dengan pergantian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru, karena mereka harus lebih bekerja keras untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Tengah*".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia

Abdul Halim (2012:35), Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang membutuhkan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Bastian (2010:138) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengatur tentang :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
2. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.
3. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran.
4. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas.

5. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
6. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan.
7. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi.
8. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap.
9. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
10. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.
11. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.
12. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.
13. PSAP No. 12 Laporan Operasional.

2.1.3 Peran Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

2.1.3.1 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1 Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6 Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4 Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:16) akuntansi daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan

untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah berdasarkan PSAP No. 01 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
2. Pelaporan finansial (*financial reports*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan operasional (LO)
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
3. Catatan atas laporan keuangan

2.1.4.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan.

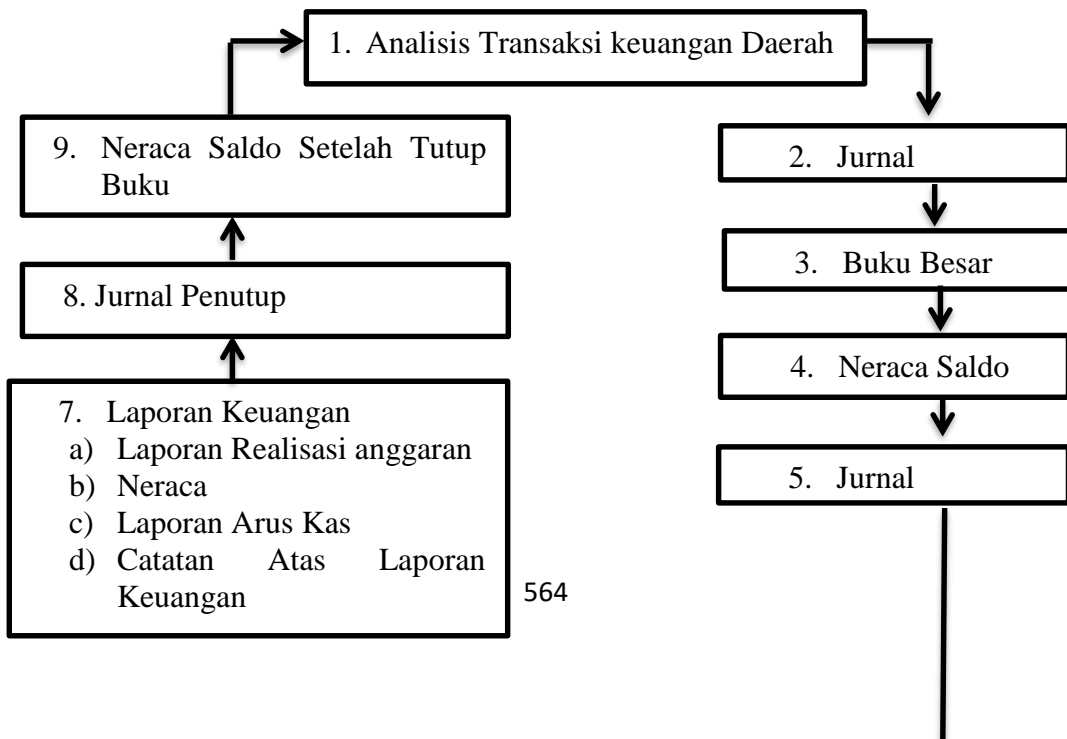
Lingkup akuntansi pemerintahan menurut Abdul dan Halim (2012) adalah :

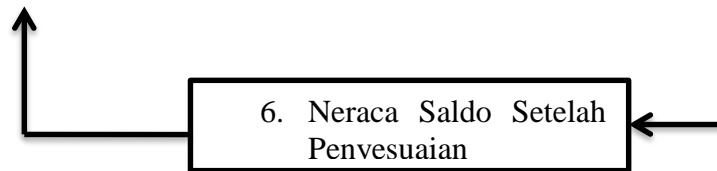
1. Akuntansi pemerintah pusat
2. Akuntansi pemerintah daerah
 - a. Akuntansi pemerintah provinsi
 - b. Akuntansi pemerintah kabupaten/kota

2.1.4.2 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

siklus akuntansi keuangan daerah menurut Sugiri (2011: 34) yang juga mengacu pada Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Nomor 56 tahun 2007 dan Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 secara umum pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah





Sumber : Sugiri (2011)

2.1.5 Laporan Keuangan

2.1.5.1 Defenisi dan Konsep Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:7) Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

2.1.5.2 Laporan Pemerintah Daerah

Menurut Surigi (2011) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LO)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali :

1. LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. LPSAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

2.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

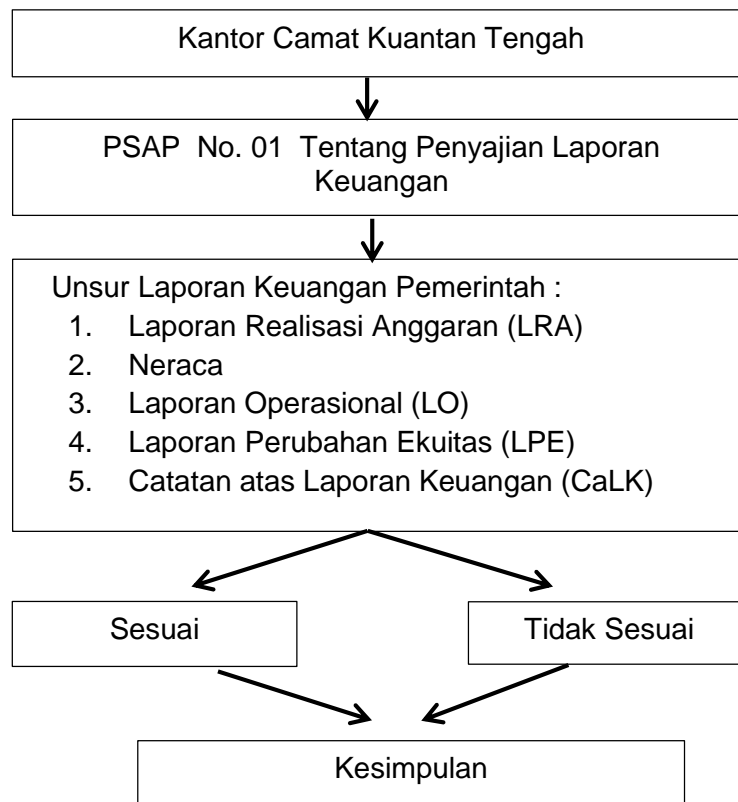
1. Relevan
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 - c. Tepat Waktu
 - d. Lengkap.
2. Andal
 - a. Penyajian Jujur.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 - c. Netralitas
 3. Dapat dibandingkan
 4. Dapat dipahami

2.1.7 Perbedaan Laporan Keuangan Swasta dan Publik

Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbedaa dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, kedua sektor juga memiliki persamaan yaitu keduanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat lapran keuangan. Siklus akuntansi pada kedua sektor tidak terdapat perbedaan signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat yang menjadi penelitian adalah Kantor Camat Kuantan Tengah yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 119 Kelurahan Sungai Jering Kota Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Telp. (0760)20756.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 10 bulan waktu dimulai dari bulan November 2019 sampai Juli 2020

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Camat Kuantan Tengah yaitu seluruh pegawai yang berada pada bagian keuangan yaitu sebanyak 4 orang.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel Penelitian pada Kantor Camat Kuantan Tengah adalah Bendahara Keuangan yang berada pada bagian keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah dengan melakukan wawancara.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif komparatif. penelitian deskriptif komparatif ini mengacu pada studi komparatif (perbandingan), studi kuantitatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019.

3.4.2 Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari data-data yang berisi informasi-informasi tentang Laporan Keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:308) Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data pada penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui teknik dari pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat dapat memenuhi standar data yang telah ditentukan. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa :

1. Observasi
2. Dokumentasi
3. Wawancara

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017).

Tahapan analisis data :

1. Pengumpulan data.
2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Peneliti Terhadap Perbandingan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Yang Di Terapkan PSAP No.01 Dengan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Singingi.

4.1.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran periode 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan PSAP No.01, karena Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah tidak mencantumkan semua komponen-komponen akun yang diatur di dalam PSAP No.01.

Laporan Realisasi Anggaran Periode 2018 dan 2019 berbeda, perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran 2018 dan 2019 terletak pada komponen-komponen akun yang di cantumkan kedalam Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk periode 2018 tidak sesuai karena hanya mencantumkan akun pendapatan, akun belanja dan akun *surplus/defisit*, sedangkan untuk periode 2019 tidak sesuai karena hanya mencantumkan akun pendapatan, akun belanja akun transfer dan akun *surplus/defisit*.

Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran periode 2018 dan 2019 terletak pada komponen akun yang dicantumkan kedalam Laporan Realisasi Anggaran, untuk periode 2018 itu tidak mencantumkan akun transfer sedangkan periode 2019 mencantumkan akun transfer walaupun tidak ada transaksi di dalam akun tersebut.

4.1.2 Analisis Neraca

Neraca yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah dari periode 2018 sampai 2019 sesuai dengan PSAP No.01, karena Neraca yang disajikan

Kantor Camat Kuantan Tengah sudah menerapkan semua komponen-komponen akun yang di atur di dalam PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

4.1.3 Analisis Laporan Operasional

Laporan Operasional yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 sampai 2019 sesuai dengan PSAP No.01 karena Laporan Operasional yang disajikan sudah menerapkan semua komponen-komponen akun yang diatur didalam PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

4.1.4 Analisis Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 sampai 2019 sesuai dengan PSAP No.01, karena Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah sudah menerapkan semua komponen-komponen akun yang diatur didalam PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

4.1.5 Analisis Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah dari periode 2018 sampai 2019 sangat sesuai dengan PSAP No.01, karena Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah benar-benar sudah menerapkan semua komponen-komponen laporan keuangan yang diatur di dalam PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

4.1.6 Analisis Penulis Tentang Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Tengah

Tabel 4.1
Analisis Penulis Tentang Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Tengah

Unsur-Unsur Laporan Keuangan		Sesuai/ Tidak Sesuai
2018	2019	
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	Tidak Sesuai
Neraca	Neraca	Sesuai
Laporan Operasional	Laporan Operasional	Sesuai
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan	Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2020

Dilihat dari data diatas Laporan Keuangan Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 sudah menyajikan sekurang-kurangnya ada lima laporan keuangan tetapi masih tidak sesuai dengan PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan oleh Kantor Camat Kuntan Tengah periode 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan PSAP No.01 karena pada Laporan Realisasi Anggaran tidak mencantumkan komponen-komponen akun yang sesuai dengan PSAP No.01 Tentang Penyajina Laporan Keuangan.

Tahun 2018 Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah hanya mencantumkan akun pendapatan, akun belanja dan akun *surplus/defisit* sedangkan PSAP No.01 telah mengatur tata cara penyajian komponen-komponen akun pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu akun pendapatan, akun belanja, akun transfer, akun *surplus/defisit*, akun pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Tahun 2019 Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah hanya mencantumkan akun pendapatan, akun belanja, akun transfer dan akun *surplus/defisit* sedangkan PSAP No.01 telah mengatur tata cara penyajian komponen-komponen akun pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu akun pendapatan, akun belanja, akun transfer, akun *surplus/defisit*, akun pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Sedangkan untuk Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah Periode 2018 dan 2019 sudah sangat sesuai dengan PSAP No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta didukung dengan data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari data yang ada bahwa penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 tingkat kesesuaian penerapan pada Kantor Camat Kuantan Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dinilai cukup baik karena di dalam laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Kuantan Tengah tidak menyajikan komponen-komponen akun transfer, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, sehingga untuk laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah belum sesuai dengan PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan pada Kantor Camat Kuantan Tengah**” Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Akuntansi Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis,MM Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., ME Selaku Ketua Prodi Akuntansi Univesitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku pembimbing I bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak selaku pembimbing II bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan di Univesitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kedua orang tua serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat dan doa serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah dan Nunuy. 2015. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Prenada Media Group, Bandung.*
- Abdul dan Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.*
- Bastian, Indra. 2010. Sistim Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.*

Gade, M. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Kamsir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Mardiasmo. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andy Iffset. Yogyakarta.

Mursyidi. 2009. Standar Akuntansi pemerintah. Penerbit Sinar Grafika.

Munawir. 2010. Analisa Laporan keuangan. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Surigi. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung

Peraturan Pemerintah

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.